

IDEOLOGI KEBANGSAAN, IDENTITAS POLITIK, DAN EKONOMI CALON PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO DALAM PROGRAM BEST RESULTS FAST 2024-2029

Didin Sabarudin¹, Purwadi²

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

E-mail: didinsabarudin@ukri.ac.id, purw4@fiksi.ukri.ac.id

Abstract: *The 2024 Presidential Election has produced three pairs of presidential and vice presidential candidates, namely Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud M.D, and Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, each of whom is supported by a coalition of parliamentary political parties resulting from the 2019 election and non-parliamentary political parties. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka was promoted and supported by the coalition of 7 parliamentary and non-parliamentary political parties with 261 seats equal to 45.39% proposing the vision and mission of ASTA GITA and the Best Results Fast program, which is the implementation of the national ideology based on Article 33 of the Constitution with the principles of kinship and identity politics based on popular democracy and economic identity with a middle way economic school. This study is to elaborate on Prabowo Subianto's understanding, commitment and thoughts and actions as stated in his vision, mission and programs. Explanatory descriptive methods with a qualitative approach and interpretive analysis in a biographical model are used to obtain meaning and connections between national ideology and multidimensional political and economic identities. The results of the study show that ideology, political identity and economics are interrelated between the figure of the Presidential candidate and the political work of political party machines and community choices which strengthen the legitimacy of identity, or give rise to resistance to different identities as a rejection of various forms of domination and hegemony from social actors in society.*

Keywords: presidential candidate, ideology, identity, Prabowo Subianto, program

Abstrak: Pemilihan Presiden 2024 memunculkan tiga pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud M.D, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang masing-masing diusung oleh koalisi partai politik parlemen hasil pemilu 2019 dan partai politik non-parlemen. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusung dan didukung oleh koalisi 7 parpol parlemen dan non-parlemen sebanyak 261 kursi setara 45,39% menyodorkan visi misi ASTA GITA dan program *Best Results Fast* merupakan implementasi dari ideologi kebangsaan dilandasi oleh UUD pasal 33 berazas kekeluargaan serta identitas politik berdasar demokrasi kerakyatan dan identitas ekonomi bermazhab ekonomi jalan tengah. Kajian ini untuk mengelaborasi tentang pemahaman-komitmen dan pikiran-tindakan Prabowo Subianto yang tercantum dalam visi, misi, dan programnya. Metode deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif dan analisis interpretasi dalam model biografis digunakan untuk memperoleh makna dan keterhubungan antara ideologi kebangsaan beserta identitas politik dan ekonomi berdimensi multidimensi. Hasil kajian menunjukkan ideologi, identitas politik dan ekonomi saling berelasi antara sosok calon Presiden dan kerja politik mesin partai politik dengan pilihan masyarakat yang menguatkan legitimasi identitas, atau memunculkan resistensi identitas yang berbeda sebagai penolakan terhadap berbagai bentuk dominasi dan hegemoni dari aktor-aktor sosial masyarakat.

Kata Kunci: calon presiden, ideologi, identitas, prabowo subianto, program.

PENDAHULUAN

Tahun 2024 Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (pileg) untuk kali kelima dalam era demokratisasi untuk memilih wakil rakyat dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota. Sebagian besar masyarakat menaruh perhatian pada sosok calon presiden yang diusung dan didukung partai politik (parpol) seperti tercantum dalam Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Demikian juga dengan antusiasme media yang memberikan porsi konsumsi sangat besar untuk para capres, bahkan sering menayangkan secara langsung kegiatan para capres dengan partai politik pengusulnya dibandingkan dengan para calon anggota legislatif yang akan berlaga dalam pemilu legislatif.

Ini bisa dipahami mengingat populasi penduduk Indonesia pemilik hak untuk dipilih dan memilih yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 204.807.222 (www.kpu.go.id, diakses 21/10/2023, 20.56) memunculkan tiga pasangan calon Presiden (capres) dan Wakil Presiden (cawapres), yaitu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, seperti disyaratkan dalam Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 222 Undang-Undang (UU) 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi partai politik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung empat parpol, yaitu Gerindra 78 kursi, PAN 44 kursi, Golkar 85 kursi, dan Demokrat 54 kursi, total 261 kursi setara dengan 45,39% didukung parpol non-parlemen dan partai baru, yaitu PBB, Partai Gelora, dan PSI dengan nama Koalisi Indonesia Maju. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin diusung tiga parpol, yaitu Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, PKS 50 kursi dengan total 167 kursi (29,05%) dan didukung partai Ummat dengan nama Koalisi Perubahan. Sedangkan Ganjar Pranowo- Mahfud diusung PDI Perjuangan 128 kursi dan PPP 19 kursi berjumlah 147 kursi (25,56%) dan didukung partai Hanura dan Perindo dengan nama Indonesia Unggul.

Menjelang pilpres, menjadi sangat relevan bagi warga bangsa yang mengangkat dan mempertanyakan isu *welfare state* (negara kesejahteraan) sebagai konsep pemerintahan yang memegang peranan vital dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial ekonomi, di mana Indonesia dan banyak negara dunia tengah didera berbagai permasalahan yang menerpa kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bisa menjadi dirupsi dengan meminjam terminologi Fukuyama (2000), sehingga relevan dengan gagasan *the founding fathers* yang termaktub dalam konstitusi UUD 1945 mengamanatkan negara melalui pemerintah (*President elected*) diberi mandat dan tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Dari ketiga pasangan capres-cawapres yang telah resmi mendaftarkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, baru Prabowo yang mencanangkan program dalam pencapresannya ketika disampaikan dalam acara Konsolidasi Zona III kader Partai Bulan Bintang (PBB) di Padang, Sumbar 10 September 2023 yang terangkum dalam "Program Best Results Fast 2024-2029" (<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230926125335-128-4756>, 10/11/2023, 6:53 PM). Prabowo melalui programnya mengedepankan ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan, industrialisasi, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta transformasi keuangan negara. Melalui program tersebut dengan turunan spesifiknya bisa ditelusuri, dilihat, dan dimaknai figur Prabowo dalam korelasi dan signifikansinya dengan ideologi kebangsaan dan identitas politik sebagai capres 2024-2029.

TINJUAN PUSTAKA

1. Ideologi Kebangsaan

Pandangan yang menyebut bahwa ide atau ideologi politik tidaklah penting, karena politik hanya perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dengan berbagai cara. Jika

pandangan ini dibenarkan, maka ide-ide politik tidak lebih sekadar propaganda atau kumpulan slogan yang dirancang untuk memenangkan suara atau menarik dukungan publik, sehingga ide dan ideologi pada kondisi ini hanya hijab yang digunakan untuk menyembunyikan realitas-realitas politik sesungguhnya yang lebih jauh dan dalam. Istilah *ideologie* secara harfiah adalah *idea-logy* bermakna ilmu tentang ide-ide muncul pertama kali dalam Revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) yang digunakan di media publik pada 1796, meski dipandang sebagai sistem berpikir abstrak dengan seperangkat ide yang ditakdirkan mensimplikasi dan mendistorsi realitas sosial karena mengklaim dapat menjelaskan apa yang sebenarnya tidak pernah bisa diceraap sebelumnya (Oakeshott 1962), sehingga disamakan dengan dogmatisme, yaitu keyakinan yang diabsolutkan dan didoktrinkan namun tercerabut dari kompleksitas realitas. Dalam perkembangannya, ideologi menjadi sistem berpikir tertutup dengan mengklaim monopoli kebenaran menurut versinya, menolak toleransi ide-ide yang berlawanan dan keyakinan saingannya, seperti komunisme dan fasisme tercermin dari karya Marx (1846, 1970), Marcuse (1964), dan Gramsci (1935, 1999).

Standar lain yang berbeda merupakan sistem terbuka dengan keyakinan para pemikir liberal dilandasi oleh komitmen pada kebebasan, toleransi, dan keragaman, seperti Popper (1945, 2002), Arendt (1951, 1989), Talmon (1952, 1970), dan Crick (1962, 1982). Sejak tahun 1970-an istilah ideologi kemudian mengakomodasi dan memadukan kebutuhan-kebutuhan sosial konvensional dan analisis politik menjadi konsep netral dan objektif yang menggeser definisi ideologi dari ide-ide lama, seperti didefinisikan oleh Seliger (1976, 2019) sebagai “seperangkat ide, dimana manusia mengumpulkan, menjelaskan, dan menjustifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara tindakan sosial secara ideal diorganisasikan, sama sekali tidak berkaitan dengan tindakan untuk melestarikan, mengubah, mengakarkan, atau membangun ulang tatanan sosial yang sudah ada”, atau menurut pemahaman lebih terkini dari pandangan Heywood (2012) bahwa: “sebuah ideologi kurang lebihnya adalah seperangkat ide koheren yang menyediakan basis bagi tindakan politik terorganisasikan dimaksudkan untuk mempertahankan, memodifikasi atau menggantikan sistem kuasa yang sudah ada”. Manfaat konsep keilmuan sosial tersebut dapat diimplementasikan ke semua “isme” yang ada, apakah liberalisme, sosialisme marxisme, fasisme, konservatisme, ataupun nasionalisme. Definisi tersebut lebih mengarahkan pada ciri penting dan pembeda fenomena melalui penekanan kompleksitas ideologi yang beranjak dari fakta telah menerobos perbatasan antara pemikiran deskriptif dan normatif, serta antara teori politik dan praktik politik yang menghasilkan dua jenis sintesis, yaitu: antara pemahaman dan komitmen, serta antara pikiran dan tindakan.

Kata bangsa atau *nation* sudah digunakan sejak abad 13 berasal dari kata Latin *nasci*, berarti dilahirkan merujuk pada sekelompok orang yang disatukan oleh kelahiran atau tempat lahir. Akhir abad 18 barulah kata tersebut memiliki signifikansi dan nuansa politik ketika digunakan pendeta Perancis anti-Jacobin, Augustin Barruel (1783) diklasifikasikan sebagai nasionalisme dan abad 19 menjadi doktrin/gerakan politik utama yang mendorong banyak revolusi di Eropa dengan keyakinan bahwa bangsa adalah prinsip sentral organisasi politik dan bersanding dengan patriotisme (dari Latin *patria* berarti tanah bapa, harfiahnya mencintai negeri sendiri) yang menyediakan basis afektif terhadap keyakinannya sebagai fondasi semua bentuk nasionalisme pembentuk identitas nasional dengan ditempa untuk merespons tantangan sejarah dan berkorelasi dengan perubahan situasi, seperti modernisasi dan industrialisasi (Gellner 1983, 2006). Nasionalisme politik kemudian merupakan fenomena kompleks dengan ciri menonjol ambiguitas dan kontradiksi daripada seperangkat tunggal nilai dan tujuan; nasionalisme menjadi alat pembebasan, namun juga penindasan; nasionalisme menjadi sumber pemerintahan mandiri dan kemerdekaan, namun juga memicu penaklukan dan penjajahan; nasionalisme telah menjadi progresif sekaligus regresif; nasionalisme mengupayakan masa depan kemerdekaan nasional, kejayaan, dan keagungan nasional masa lalu dengan memapankan identitas yang sudah ada; nasionalisme juga menjadi rasional sekaligus irasional yang mengandung keyakinan prinsipil penentuan diri nasional, namun juga lahir dari dorongan dan emosi non-rasional, seperti kebanggaan,

ketakutan, dan kebencian masa lalu. Ketidakjelasan ideologi merupakan produk dari banyak faktor dalam konteks perbedaan sejarah, warisan kultural yang sering kali berlawanan, dan digunakan untuk mengembangkan beragam motif dan aspirasi politis Heywood (2012).

2. Identitas Politik

Kata identitas menurut Bourdieu (1983, 2003) diartikan sebagai sesuatu yang lain dengan menyebut kategori '*native*' (penduduk asli/pribumi), '*folk*' (rakyat), atau '*lay*' (awam/biasa) dimana kategori-kategori ini berkembang dan menyebar pada aktor masyarakat biasa sebagai pembeda dari kategori pengalaman terpisah yang dipergunakan oleh para analis sosial. Tilly (1996:1-17, 2003) mengkarakterisasikan identitas sebagai konsep yang tersamar, tetapi sangat diperlukan dan mendefinisikannya sebagai pengalaman aktor dengan kategori, ikatan, peranan, jejaring, grup atau organisasi yang terkait pada representasi publik melalui pengalamannya, dimana representasi publik sering mengambil bentuk dari sebuah narasi sejarah. Hal berbeda diungkapkan oleh Appiah (2007) dengan mengkritik aspek identitas yang dibentuk berdasarkan identitas nasional, ras, agama, dan gender. Ia menganggap orang yang bereksistensi identitasnya merupakan orang yang membatasi hidupnya pada kriteria tertentu, kelompok tertentu, sehingga dengan mudah mendiskriminasi, menimbulkan kekerasan, dan mengakibatkan kejadian-kejadian katastrofik. Ia berusaha mengangkat klaim individualitas dan mempertahankan pandangan liberalism tentang kesetaraan manusia, tetapi juga menyadari adanya klaim soal perbedaan yang ada sejak lahir. Sedangkan Suparlan (2004:25) mengatakan bahwa identitas atau jati diri muncul dan berada dalam interaksi seseorang yang mempunyai jati diri tertentu karena diakui keberadaannya oleh orang lain dalam suatu hubungan yang berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nampak bahwa seseorang atau sekelompok orang membutuhkan jati diri untuk digunakan dalam interaksi. Hal ini berarti bahwa dalam interaksi, pelaku mengambil suatu posisi. Selanjutnya berdasarkan atas posisi tersebut, si pelaku menjalankan peranannya sesuai dengan corak atau struktur interaksi yang berlangsung. Di dalam kenyataan sehari-hari, setiap orang akan memiliki lebih dari satu jati diri. Artinya, semakin banyak peranan yang dijalankan dalam kehidupan sosial seseorang, maka yang bersangkutan akan semakin banyak pula jati diri yang dimilikinya.

Castells (2010:8) menyebutkan tiga bentuk pembanguan identitas, yaitu:

- a. Identitas legitimasi (*legitimizing identity*), yaitu identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, misalnya suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah memperoleh legitimasi untuk melakukan hal tersebut.
- b. Identitas resisten (*resistance identity*), yaitu sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan dengan adanya dominasi dan stereotip oleh pihak-pihak lain, sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak yang mendominasi dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya.
- c. Identitas proyek (*project identity*), yaitu suatu identitas dimana aktor-aktor sosial membentuk identitas baru yang dapat menentukan posisi baru dalam masyarakat. Misalnya terjadi ketika aktivis feminisme berusaha membentuk identitas baru perempuan, menegosiasikan ulang posisinya dalam masyarakat, akhirnya merubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang peranan perempuan.

Fokus utama pada tulisan ini adalah identitas politik digunakan sebagai perangkat konseptual yang menghubungkan kepada ideologi kebangsaan calon Presiden Prabowo Subianto dan terkoneksi pada pemahaman tentang program yang dimunculkannya dalam pilpres 2024, yaitu "Best Results Fast", dimana politik identitas (*political of identity*) dibedakan dengan identitas politik (*political identity*). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Sabarudin 2021). Pertama, penggunaannya secara umum merupakan atribut yang melekat

pada sosok Prabowo Subianto dengan apa yang dilakukannya sebagai politisi atau dalam institusi politik (partai politik) yang membicarakan atau membahas Indonesia dan warga bangsanya sebagai isu bersama.

Kedua, ketika membicarakan atau membahas identitas politik, tidaklah perlu diasumsikan pada kekuasaan masa lalu tentang apa yang seharusnya terjadi pada masa kini dan masa mendatang, namun yang lebih penting adalah elaborasi ulang dan mendalam mengenai program tersebut untuk warga bangsa dan generasi selanjutnya, terutama dalam era global, warisan kultural berubah sangat cepat daripada sebelumnya yang memproduksi bentuk kehidupan glokalisasi diinspirasi oleh model orang Amerika daripada model Eropa. Ketiga, basis identitas tidaklah bersifat eksklusif tidak secara sederhana dan sangat alami seperti pandangan Huntington (1996) tentang tipe identitas yang mempertentangkan identitas orang Eropa dengan kultur dan politik orang Amerika melalui pernyataannya bahwa: “Kita mengetahui siapa kita ketika kita tahu dengan siapa kita berlawanan”. Identitas kita/kelompok dalam pilpres selalu terdiri dari dua momen, yaitu sebagai cermin dimaknai sebagai koalisi gabungan partai politik yang mengusulkan dan mendukung capresnya merefleksikan dan mendefinisikan ulang ciri-ciri atau keistimewaannya, serta sebagai dinding, dimana partai politik, koalisi parpol, dan komunitas sosial atau relawan pendukung menyampaikan gambaran capres yang berperan penting dalam berhubungan dengan kelompok identitas lainnya (Cerutti and Rudolph, 2001) dan menolak identifikasi mereka sebagai warga negara istimewa Fuchs and Klingemann (2000, 2011). Keempat, identitas memainkan peran mendefinisikan legitimasi politik, secara epistemologi dan ontologi memiliki keutamaan spesifik, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan mumpuni sebagai aktor politik dalam kerangka kerja normatif (legislasi secara umum, etik patriotisme, dan kewajiban warga negara) yang mana preferensi parpol, koalisi parpol, dan komunitas sosial atau relawan pendukung ditempatkan di dalam keteraturan hierarkis dan/atau merekonsiliasi dengan yang lainnya. Secara normatif identitas politik ditanamkan dengan membagikan melalui para anggotanya atau mayoritas diantara mereka, sehingga nilai dan prinsip tersebut dikenal sebagai politik “kita”, sehingga identitas merupakan proses identifikasi diri melalui pengakuan diri yang dikenal publik sebagai milik bersama untuk berbagi, namun juga nilai dan prinsip tersebut dimodifikasi dan diinterpretasi ulang sesuai dengan pencapaian kepentingan dan tujuan mereka (Lucarelli, 2004, and Manners 2006), (Arts and Halman 2004) and (Nucci, Krettenauer, and Narváez 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian dalam tulisan ini adalah *article review* berupa studi kepustakaan (*desk study*) dengan menelaah dan mengambil data-data dari beragam literatur (Nasir 1998:93) dan publikasi tentang program Best Results Fast calon Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024-2029 sebagai interaksi manusia dalam konteks interpersonal, organisasional, dan publik (Imran 2013). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksplanatori, yaitu penelitian untuk mengeksplanasikan fenomena atau kenyataan sosial yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain melalui pengukuran/kuantifikasi untuk menunjukkan tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, ataupun hubungan kekerabatan (Creswell et al. 2018). Studi kepustakaan ini menggunakan model biografis (Latief, 2004) dengan objeknya adalah sifat, watak, pengaruh lingkungan atau pengaruh pemikiran, dan ide dari subjek penelitian, serta proses pembentukan watak figur yang diterimanya (Raco, 2010).

Pendekatan metode kajian menggunakan analisis interpretasi yang bertujuan memperoleh makna dan keterhubungan antara sebuah fakta dengan fakta/peristiwa lainnya dalam multidimensi (Kuntowijoyo, 2005) untuk membantu kajian objektif dan menghindari subjektivitas peneliti, yaitu: intelektualitas peneliti, titik berdiri/sudut pandang peneliti, dan pengenalan sumber (Poespoprodjo, 1999). Verifikasi dilakukan melalui kredibilitas sumber dan otentisitas data, sehingga data yang dihasilkan akan diinterpretasikan sebagai penilaian dan masukan terhadap realitas tersebut, seperti dikemukakan oleh Creswell et al.

(2018:264): “*qualitative research is interpretative research As such, the biases, values and judgment of the researches become stated explicitly in the research report. Such openness is considered to be useful and positive*”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahun politik 2024 dalam pemilihan Presiden memunculkan hanya tiga pasangan capres dan cawapres yang akan berkompetisi untuk merebut suara rakyat pemilih lebih dari 200 juta orang yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, dimana setiap capres menyodorkan programnya dalam menarik simpati pemilik hak suara tersebut. Diantara ketiga kandidat Presiden, paling awal sejak September 2023 Capres Prabowo Subianto telah menyampaikan misi besarnya yang dibungkus melalui “Program Best Results Fast 2024-2029” bila kelak terpilih menjadi Presiden Indonesia yang difokuskan pada bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan, industrialisasi, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta transformasi keuangan negara, sehingga menemukan relevansi dengan korelasi pada makna ideologi kebangsaan dan identitas politiknya.

1. Pemahaman-Komitmen dan Pikiran-Tindakan Kebangsaan Calon Presiden Prabowo Subianto

Menjemput tahun politik 2024 dalam Pemilihan Presiden, isu *welfare state* (negara kesejahteraan) kembali mengemuka sebagai tantangan yang harus direspon oleh para kandidat capres, dimana negara kesejahteraan adalah negara dengan konsep pemerintahan sebagai kunci pemegang peran penting dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kehidupan sosial ekonomi warga bangsanya (Britannica, 3 November 2023). Konsep negara kesejahteraan tersebut relevan dengan gagasan para pendiri bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara (melalui) pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Dalam bidang ketahanan pangan, Prabowo mengajukan program pemberian makan siang dan minum susu gratis bagi siswa di sekolah, di pesantren, dan anak-anak balita serta bantuan gizi untuk ibu hamil.

Data Kementerian Kesehatan 2020 menyebutkan bahwa di ibukota negara Jakarta terjadi gagal tumbuh 1 dari 3 anak dan di NTT adalah 2 dari 3 anak mengalami *stunting* akibat malnutrisi yang berakibat pada prestasi di sekolah, kesempatan bersaing yang sama, dan kesulitan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Karenanya, besaran anggaran yang diperlukan dan harus dipersiapkan untuk melaksanakan program tersebut dari alokasi APBN bila dirinci adalah sebagai berikut: data Badan Pusat Statistik (BPS) dua tahun lalu mencatat jumlah siswa Indonesia mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 57.986.468 orang yang tersebar di berbagai sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) dengan prosentase terbesarnya berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 28,3 juta orang. Bila dialokasikan tiap siswa untuk makan siang Rp.15.000 ditambah susu Rp.3.000 dikalikan dengan hari efektif sekolah yang dirilis Kemendikbud pada tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 255 hari, maka perkiraan kebutuhan anggaran untuk makan siang berjumlah Rp.221,80 triliun ditambah untuk konsumsi susu Rp.44,36 triliun, sehingga total keduanya mencapai jumlah Rp.266,16 triliun dalam setahun. Sedangkan bantuan makan siang untuk balita dengan data BPS berjumlah 22.094.425 jiwa bila dianggarkan Rp.20.000/jiwa, maka kebutuhannya mencapai Rp.161,29 triliun setiap tahun. Bila ketiga program dijumlahkan membutuhkan anggaran sebesar Rp.427,5 triliun dalam setahun, belum dihitung besaran anggaran untuk memasukkan kebutuhan bantuan gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk program tersebut, Prabowo Subianto akan menganggarkan biaya sebesar Rp.400 triliun yang dipenuhi dari dua pos, yaitu dari alokasi dana pendidikan dan perlindungan sosial, bila melirik alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024 sebagai komparasi masing-masing mendapat alokasi dana mencapai 660 triliun ditambah 500 triliun (<https://nasional.kontan.co.id/news/visi-misi-capres-prabowo-bakal-anggarkan-Rp-400-triliun-untuk-makan-siang-anak>).

Banyak pemimpin negara di belahan dunia lainnya telah melakukan pemberian makan sekolah gratis bagi para siswa sekolah. Brasil dan El Salvador menyediakan makan sekolah gratis bagi keluarga berpenghasilan rendah telah membantu mengatasi obesitas dan meningkatkan pendidikan gizi dengan mensyaratkan 30% makanan yang disajikan berasal dari pertanian keluarga lokal di kota sekolah berada. Negara Inggris Raya, Inggris, Wales dan Skotlandia berkomitmen menyediakan makan sekolah gratis bagi semua siswa SD sebagai agenda penting terhadap akses makanan bergizi. Pemerintah India sejak tahun 1995 memiliki program makan siang terbesar di dunia untuk 125 juta anak berusia 6-14 tahun berbiaya US\$ 2,8 miliar yang bertujuan untuk mengurangi kelaparan anak, meningkatkan partisipasi dan kehadiran anak di sekolah, serta meningkatkan kesehatan gizi dan hasil pendidikan. Hasilnya terbukti memiliki dampak antar generasi, dimana lebih sedikit anak-anak pendek lahir sebagai tanda umum kekurangan gizi dari perempuan yang memperoleh manfaat dari program makanan sekolah. Negara Skandinavia, seperti Finlandia dan Swedia menyajikan 260 juta makanan hangat per tahun untuk siswa berusia 7-16 tahun dan sebagian berusia 16-19 tahun. Penelitian terhadap skema tersebut bahwa anak-anak yang mengkonsumsi makanan tersebut tidak hanya meningkatkan pencapaian pendidikannya, namun juga menjadi lebih sehat seiring pertumbuhannya. Bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan terendah yang menerima makanan sekolah gratis selama sembilan tahun silimeningkatkan pendapatan seumur hidupnya sebesar 6% yang menghasilkan rasio manfaat terhadap biaya sebesar 7 banding 1 (7:1). Demikian juga dengan negara Afrika, seperti Benin, Kenya, dan Rwanda berupaya melakukan hal serupa secara aktif yang berkomitmen terhadap visi jangka panjang penyediaan makanan sekolah secara universal dengan skema pembiayaan terbesar dialokasikan dari anggaran dalam negerinya.

Program penyediaan makan gratis dan susu bagi siswa di sekolah, di pesantren, dan anak-anak balita serta bantuan gizi untuk ibu hamil memiliki konsekuensi terhadap penyediaan dan fasilitasi bahan baku beras dan produk pangan lainnya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan produk hewani lainnya untuk memenuhi kebutuhan program tersebut, belum lagi termasuk kebutuhan pangan bagi masyarakat umum dewasa diatas usia anak-anak dan selain ibu hamil. Oleh karenanya, Swasembada pangan menjadi prioritas bagi semua cawapres, Prabowo Subianto meluncurkan program Swasembada pangan sebagai bagian dari visi dan delapan misi ASTA CITA untuk menjawab atau memberikan jalan keluar menggapai cita-cita bangsa yang belum tercapai masih merupakan angan-angan, akibat dari alih fungsi lahan terus meningkat kurang terkendali, dimana pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2023 sudah menembus 278 juta jiwa dengan mayoritas merupakan usia produktif yang membutuhkan tempat tinggal, lahan pemukiman, industri, dan lahan peruntukan lainnya serta menyusutnya jumlah petani karena generasi muda tidak tertarik dengan profesi tersebut dan tidak menjanjikan kehidupan yang layak, dimana rata-rata upah sektor pertanian adalah terendah dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti terekam dalam data BPS per Juli 2023 upah per hari sebesar Rp.68.740 atau berkisar Rp.2 juta per bulan. Swasembada pangan maknanya Indonesia sudah bisa atau sanggup memproduksi cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok masyarakat, yaitu beras, dimana konsumsinya per bulan mencapai sekitar 2,55 juta ton, sedangkan produksi beras nasional rata-rata hanya berkisar antara 2,28 sampai 2,46 juta ton per bulan, sehingga produksi beras nasional yang kian menyusut tidak bisa menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang lebih tinggi menjadikan Indonesia sebagai negara *net importir* beras. Misi bidang pangan Prabowo Subianto komplementer dengan bidang lainnya, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Strategi yang ditempuh untuk menopang ketahanan pangan adalah dengan melakukan eksplorasi dan revitalisasi rawa-rawa yang berjumlah 24 juta hektar (ha) untuk menghasilkan lumbung pangan yang berada di rawa, termasuk memproduksi produk pangan lainnya, seperti buah-buahan, sayuran, dan produk hewani.. Hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak hutan karena alih fungsi yang banyak disorot dunia internasional.

Misi bidang pangan dan makan siang gratis akan menemukan korelasinya pada bidang pendidikan sebagai isu penting dalam program ASTA CITA, yaitu membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi untuk penguatan sains dan teknologi serta digitalisasi, dimana pendidikan merupakan kunci vital untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebagai salah satu modal investasi meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Secara aktual bisa dirujuk data Kemedikbud yang mengukur skor Indonesia untuk *Programme for International Student Assessment (PISA)* 2018 berada di urutan ke-74 atau peringkat keenam dari bawah dari 80 negara. Hasil studi PISA tersebut menyebutkan kemampuan membaca siswa Indonesia memperoleh skor 371 berada di posisi 74 di bawah skor rata-rata OECD, yaitu 487. Skor 379 di posisi 73 untuk kemampuan matematika dengan skor rata-rata OECD 487, dan skor 396 untuk kemampuan sains di posisi 71 dengan skor rata-rata OECD 489. Dengan demikian menunjukkan rendahnya skor membaca, matematika, dan sains mencerminkan masih minimnya kualitas SDM siswa Indonesia.

Bank Dunia menghitung *Human Capital Index (HCI)* untuk melihat peran pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas di masa mendatang merilis peringkat Indonesia tahun 2020 dengan nilai 0,54 berada di posisi 96 dari 175 negara. Padahal *mandatory spending* sebesar 20% dari alokasi APBN untuk pendidikan yang diamanatkan regulasi telah dijalankan sejak lebih dari sepuluh tahun lalu dengan lonjakan anggaran 182% dari tahun 2010 sebesar Rp.216,72 triliun menjadi Rp.612,2 triliun pada tahun 2022, namun *mandatory* tersebut belum memperoleh hasil signifikan terhadap output pendidikan. Melalui misi pendidikan dalam program ASTA CITA tersebut menentukan arah pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan SDM yang tangguh, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi bidang pendidikan ini setidaknya memberi solusi kepada masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan layak dengan melihat data penduduk Indonesia dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Juni 2023 sebanyak 279,12 juta jiwa, ternyata hanya 6,41% atau sekitar 17,64 juta penduduk yang menempuh pendidikan tinggi hingga tahun 2022, dengan rincian 1,69% untuk Diploma, 4,39% jenjang S1, 0,31% jenjang S2, dan 0,02% jenjang S3, sedangkan untuk pendidikan hingga SMA sederajat jumlahnya sekitar 57,53 juta atau 20,89%.

Dengan misi tersebut setidaknya bisa memberikan gambaran keberpihakan capres Prabowo Subianto terhadap warga negara Indonesia, terutama kepada rakyat kecil yang berada dalam himpitan kesulitan ekonomi atau dalam istilah Presiden RI pertama disebut wong cilik atau kaum marhaen adalah rakyat biasa dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah masih terbelakang (Melawati & Kuswono, 2018) sebagai hasil perjuangan revolusioner Soekarno untuk membebaskan kaum marhaen dari penindasan kolonialisme Belanda (Kuswono 2016). Konsep wong cilik inilah yang mengilhami Soekarno memberi nama Marhaen tentang sosialisme khas Indonesia (Pratama, Asyiah, and Chandra 2022) digunakan untuk merepresentasikan rakyat Indonesia yang dimelaratkan oleh imperialisme dan kapitalisme eksploitatif kaum borjuis sebagai sosialisme Indonesia dalam praktik (Adams 2011), meski istilah ini kemudian telah bergeser maknanya menjadi elitis, oportunist, dan pragmatis (Dewantara 2017), terutama pasca reformasi ketika mendekati pemilu sebagai slogan kampanye menarik simpati dan dukungan masyarakat pemilih. Bercermin dari fakta sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia dan kejadian reformasi 1998, ada yang keliru dengan harus memilih mazhab ekonomi yang digunakan apakah liberalisme atau sosialisme. Letaknya bukan pada kata “memilih”, seperti diungkapkan Prabowo Subianto (2022,115): “*Kalau saya berpendapat, kenapa kita harus memilih? Kita mau ambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Gabungan dari yang terbaik inilah yang disebut oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, oleh Bapak saya Prof. Sumitro sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila yang bentuknya tertulis di Undang-Undang Dasar '45, khususnya pasal 33. Boleh juga kita sebut ekonomi konstitusi*”. Ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi yang diambil sebagai respons untuk perbaikan ekonomi menetes ke bawah, *trickle down effect* yang berjalan selama ini, dimana faktualnya bahkan terjadi kebalikannya, yaitu *trickle up effect*, orang yang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

Buktinya merujuk data Kemenkes dan Global Hunger Index 2020, BPS maret 2021, Credit Suisse Global Wealth Databook 2021, dan Bank Dunia 2021 (dalam Subianto, 2022:70-86) bahwa: 27%-43% anak Indonesia gagal tumbuh yang mendapatkan skor 21,9 dalam indeks kelaparan global sebagai salah satu negara tertinggi di dunia setara dengan Kamerun dan Namibia yang lebih miskin; 27,5 juta (10,2%) orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah Rp.472.000/orang/bulan atau Rp.15.700/orang/hari dan 115 juta (45%) penduduk Indonesia masuk ke kategori rentan miskin; serta angka rasio gini Indonesia 0,366, artinya 1% orang terkaya (2,7 juta orang) menguasai 36% kekayaan setara Rp.16.800 triliun dari total kekayaan Indonesia Rp.44.800 triliun. Dari pernyataan dengan dukungan data tersebut tergambar bahwa ekonomi yang akan dijalankan Prabowo Subianto bukan mengikuti mazhab liberalisme atau pun sosialis-komunisme, namun meramu yang terbaik diantara keduanya dengan menyebut ekonomi jalan tengah atau ekonomi jalan ketiga, dimana referensinya lebih sebagai pendekatan *the third way* Anthony Giddens yang muncul tahun 1980-an dalam versi terbaru melalui teori strukturisasi dan pernah diimplementasikan di Inggris pada era pemerintahan perdana menteri Tony Blair.

2. Jati Diri Politik dan Ekonomi Calon Presiden Prabowo Subianto Dalam Ideologi Kebangsaan

Ideologi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu membentuk identitas kelompok atau bangsa yang memiliki kecenderungan untuk memisahkan antara “kita” dan “mereka” (*ingroup* dan *outgroup*), dalam hal ini membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya di dunia. Namun, ideologi berfungsi mempersatukan manusia dari berbagai agama, ras, atau etnis, seperti halnya agama mempersatukan manusia dari beragam pandangan hidup dan ideologi, sehingga ideologi berfungsi mengatasi atau meminimalisir konflik atau ketegangan sosial yang disebut oleh Sastrapratedja (1991) sebagai *solidarity making* dengan mengangkat beragam perbedaan ke dalam tatanan nilai yang lebih tinggi, yaitu Pancasila. Ciri-ciri identifikasi konsep identitas dalam ideologi dapat dilihat melalui dua dimensi (Al Muhtar, 2020), yaitu konsep dasar sosiologis dengan pokok bahasan di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan kajian politik sebagai hasil dari pemikiran politik Prabowo Subianto dikembangkan di dalam lembaga politik, yaitu partai politik bernama Gerindra yang digunakan untuk mencapai tujuan politik dalam pemilu eksekutif Presiden dan kepala daerah, serta pemilu legislatif.

Identitas fisik sosiologis Prabowo Subianto sering dicitrakan sebagai tokoh yang mirip dengan Soekarno dan berdandan ala Soekarno, mulai dari gaya busana menggunakan kemeja putih berkantong saku empat dan peci hitam hingga cara berpidato serta ide-ide nasionalisme mirip dengan Bung Karno sebagai representasi jiwa nasionalisme Indonesia (Amalo, 2015), seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Reuters-CNBC

Nasionalisme Indonesia sejak lahirnya proklamasi kemerdekaan secara tegas sudah menyatakan anti-kolonialisme, anti-kapitalisme, dan anti-imperialisme yang berangkat dari pengalaman sejarah kelam dan objektif bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah dan koloni bangsa-bangsa lain lebih dari tiga abad lamanya. Ancaman kapitalisme bukan hanya datang dari bangsa barat semata, melainkan bisa datang dari bangsa sendiri, seperti pernyataan Bung Karno bahwa kapitalisme bukanlah identifikasi suatu bangsa, namun suatu paham atau sistem pergaulan hidup yang timbul dari pemisahan cara produksi para pekerja dari alat-alat produksi. Dalam buku karyanya “Kapitalisme Bangsa Sendiri” (dalam Lane, 2012), Bung Karno menyatakan: “... kita bukan sahaja harus menentang kapitalisme asing, tapi juga harus menentang kapitalisme bangsa sendiri ...”.

Selain ekonomi, demokrasi politik yang banyak dianut oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai *rule by the people* dimaknai oleh Prabowo Subianto (2022:152) sebagai perwujudan demokrasi rakyat dengan pemimpin penganut demokrasi dapat membuktikan bahwa mereka (pemimpin) memberikan pemerintahan sebaik-baiknya pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat, dan tentu saja implementasinya harus sesuai dengan amanat konsitusi UUD 45 pasal 33 dengan azas yang melandasinya adalah kekeluargaan. Terma demokrasi rakyat tersebut berbeda dengan demokrasi di negara barat penganut liberalisme, dimana demokrasi politik minus demokrasi ekonomi menjadi identik dengan kapitalisme atau borjuasi, serta sosialisme-komunisme yang mengintegrasikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menjadi identik dengan Marxisme yang lebih disebut dengan sosialis demokrat, meskipun sebenarnya sosialisme bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia, karena mengambil bentuk dari kondisi asli bangsa dan gerakan-gerakan nasionalis, seperti kepemilikan komunal, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat, khususnya terjadi pada masyarakat pedesaan yang disebut sebagai komunisme primitif pra-feodal dan pra-kapitalis (Mintz and Zuhilmiyasri 2002).

Jati diri atau identitas politik sebagai cerminan ideologi kebangsaan Prabowo Subianto bersifat dinamis, tidak terbatas pada alam pikiran maupun sistem kehidupan yang memiliki eksistensi materialnya dalam berbagai aktivitas praktis dengan memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis dan perilaku moral, ekuivalen dengan agama dalam makna sekulernya, yaitu pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku untuk mencapai orientasi politik maupun ekonomi (Maimun, 2015). Konsep Prabowo Subianto yang lainnya adalah membangun kemandirian atau tidak bergantung kepada bangsa lain merupakan ciri atau karakter yang mengindikasikan maju tidaknya suatu bangsa (Dedi, 2028) dengan pemaknaan apa yang disebut oleh Bung Karno sebagai “berdikari”, berdiri di atas kaki sendiri dan non-kooperatif (Argenti and Istiningdias, 2018), serta kepercayaan diri sebagai bangsa Indonesia untuk mandiri tanpa mengandalkan bantuan bangsa lain untuk memecahkan dan mencari solusi terhadap permasalahan bangsa dengan merujuk pada norma dan cita-cita bangsa dan mengacu pada keadaan yang penuh kemandirian, kreatifitas, keaslian, dan kepercayaan pada kekuatan sendiri untuk menciptakan kebahagiaan (Mawarti & Sundawa, 2016).

KESIMPULAN

Perhelatan pemilihan umum memperebutkan kursi legislatif tahun 2024 di semua jenjang dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat berbarengan dengan pemilihan Presiden khususnya sebagai mekanisme sirkulasi pergantian kepemimpinan secara demokratis dan konstitusional memunculkan tiga pasangan calon Presiden, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud M.D, dan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dimana ketiga capres sudah meluncurkan visi misi dan program untuk menjadi Presiden. Capres Prabowo Subianto telah menyodorkan visi misinya dalam balutan bernama ASTA GITA yang kemudian diturunkan ke dalam program implementatif *Best Results Fast* lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan politik dan ekonominya. Dasar ideologi kebangsaan dalam bidang politik yang melandasinya adalah UUD 1945 dalam eksistensinya berbentuk demokrasi rakyat dengan azas kekeluargaan, bukan demokrasi liberal ataupun sosialisme-komunisme. Sedangkan bidang ekonominya bersandarkan pada mazhab

ekonomi jalan tengah sebagai kolaborasi dari pilihan apa yang terbaik dari mazhab liberalisme dan sosialisme-komunisme, tidak murni mengikuti salah satu di antara kedua mazhab ekonomi tersebut. Konsep ideologi kebangsaan itulah yang kemudian menjadi identitas politik Prabowo Subianto dalam mencalonkan sebagai Presiden 2024-2029.

Pencalonan Prabowo Subianto diusung oleh koalisi empat parpol parlemen dengan 261 kursi legislatif atau setara 45,39% perolehan kursi DPR secara nasional dan didukung oleh tiga parpol non-parlemen memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap legitimasi identitasnya untuk diperkenalkan dan disosialisasikan oleh ketujuh parpol pengusung dan pendukungnya dalam memenangkan kompetisi pemilihan Presiden. Pemahaman dan komitmen serta pikiran dan tindakan Prabowo Subianto akan diuji dan dibuktikan terhadap konsistensi ideologi kebangsaan dan identitas politiknya dalam masa kampanye dan debat capres, apakah bisa meyakinkan, menarik simpati dan masyarakat ketika datang ke bilik suara untuk memilihnya menjadi Presiden RI ke 8, atau bahkan terjadi kontradiktif manakala selama menjelang pelaksanaan pemungutan suara, masyarakat pemilih memperoleh informasi lain yang lebih memberikan keyakinan dan kepercayaan sebaliknya. Bila memang hal itu terjadi, ada beberapa kondisi yang bisa menjadi indikatornya, pertama: mesin politik tujuh parpol koalisi tidak bekerja turun ke bawah menemui masyarakat pemilih untuk merasionalisasikan sosok Prabowo Subianto, kedua: terjadi friksi antara elit setiap parpol dengan para anggotanya dan tim pemenangan parpol dalam gabungan tujuh partai, dan ketiga: pragmatisme transaksional dan benturan kepentingan subjektif antara calon legislatif dan parpol untuk lolos *parliamentary treshold* dengan pemilihan Presiden. Akibatnya adalah munculnya identitas resisten terhadap sosok capres Prabowo Subianto dari aktor-aktor sosial di masyarakat terhadap beragam bentuk dominasi dan stereotip menjelma sebagai identitas berbeda bertendensi negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adams, C. (2011). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Appiah, A. K. (2007). *The Ethics of Identity*. New Jersey: Princeton University Press.
- Arendt, H. (1951). *The Origins of Totalitarianism*. London: Allen & Unwin.
- Arts, W. and Halman, L, eds. (2004). *European Values at the Turn of the Millennium*. Leiden: Brill.
- Bourdieu, P. (1983). *Elements of Semiology*. New York: Hill and Wong.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity 2nd Edition*. Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
- Creswell, J. W. & Creswel, J.D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Eds*. California: Sage Publications, Inc.
- Crick, B. (1962). *A Defense of Politics*. Harmondsworth: Penguin.
- Dewantara, A. W. (2017). *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Fukuyama, F. (2000). *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. New York: Touchstone.
- Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell.
- Gramsci, A. ([1935] 1999). *Selections from the Prison Notebooks, ed. Q. Hoare and G. Nowell-Smith*. London: ElecBook.
- Heywood, A. (2012). *Political Ideologies: An Introduction*. 5th Edition. London: Palgrave Macmillan.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lane, M. (2012). *Malapetaka Di Indonesia, Sebuah Esei Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baru.
- Latief, J.A. (2004). *Haji Hayyun Seorang Imam dan Pejuang*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Marcuse, H. (1964). *One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Boston, M.A: Beacon.
- Marx, K. dan F. Engels. ([1846] 1970). *The German Ideology*. London: Lawrence & Wishart.
- Mintz, J. S. (2002). Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia (Zulhilmiyasri, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oakeshott, M. ([1962] 1981). *Rationalism in Politics and Other Essays*. London: Methuen (New York: Routledge Chapman & Hall).
- Popper, K. (1957). *The Poverty of Historicism*. London: Routledge.
- Poespoprodjo, W. (1999). *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu*. Bandung: Remadja Karya.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Seliger, M. (1976). *Politics and Ideology*. London: Allen & Unwin (Glencoe II: Free Press).
- Subianto, P. (2022). *PARADOKS INDONESIA DAN SOLUSINYA*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT. Media Pandu Bangsa.
- Talmon, J. L. (1952). *The Origins of Totalitarian Democracy*. New York: W.W Norton & Co.
- Tilly, C. (1996). *Citizenship, Identity and Social History*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Buku Kumpulan Artikel

- Nucci, L. P., Krettenauer, T., & Narváez, D. (2014). *Handbook of Moral and Character Education*, 2nd Eds. New York: Routledge.
- Sastrapratedja, M. (1991). Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya. In *Pancasila Sebagai Ideologi dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, hal. 142-144. Jakarta: BP7.

Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel

- Al Muchtar, S. (2020). Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*. Badan Pengkajian MPR RI, edisi 5, agustus.
- Cerutti, F. (2001). Towards the Political Identity of the Europeans. An Introduction, in F.Cerutti-E.Rudolph, eds., *A Soul for Europe. On the Political and Cultural Identity of the Europeans*, Vol.1, A Reader, Peeters, Leuven, pp.1-31.
- Fuchs, D. (2000). Demos und Nation in der Europaeischen Union in: Hans-Dieter Klingemann und Friedhelm Neidhardt (eds.), *Zur Zukunft der Demokratie. Herausforderungen im Zeitalter der Globalisierung*. WZB-Jahrbuch, Berlin: edition sigma, pp. 215-236.
- Lucarelli, S. (2006). Introduction, in Lucarelli S. and Manners I. (eds). *Values and Principles in European Foreign Policy*. London: Routledge.

Artikel dalam Jurnal/Majalah

- Amalo, G. F. P. (2015). Prabowo Subianto dan Soekarnoisme. *JURNAL INTERAKSI*, Vol.4 No.2, pp.165-174.
- Argenti, G. & Dias, D. S. I. (2018). Soekarno's Political Thinking about Guided Democracy. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 46-63. <https://doi.org/10.35706/JPI.V3I2.1654>
- Dedi, A. (2018). Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 527-532. <https://doi.org/10.25157/DINAMIKA.V4I4.873>.
- Imran, Hasyim Ali. (2013). Fenomena Komunikasi dan Ilmu Komunikasi; Telaah Filsafat Ilmu Berbasis Elemen Epistemologi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol.17, No.2, 197-217. <https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170207>.
- Kuswono. (2016). Marhaenism: Social Ideology Create by Sukarno. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 119-130. <https://doi.org/10.24127/HJ.V4I2.549>.

- Lucarelli, S. and Radaelli, C. (2004). The European Convention: A Problem of Mobilization? *South European Society and Politics*. Vol.9,No.1,pp.1-23.
- Mawarti, R. A., & Sundawa, D. (2016). Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi kasus pada komunitas “Pasukan Kresek” di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 16(2), 63-84. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V16I2.934>.
- Melawati, C. E., & Kuswono. (2018). Marhaenisme: Telaah Pemikiran Sukarno. *Swarnadwipa*, 2(3), 153-163.
- Pratama, F. F, A. K. Asyiah, dan D. Chandra. (2022). Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia. *JURNAL KEWARGENEGARAAN*, Volume 19, Nomor 1. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33301>.
- Sabarudin, D. (2021). Political Communication Based on Identity Politics and Social Networking Media in the Period 2012-2017 DKI Jakarta Governor Election. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Vol.IX, No.2,111-125. <https://doi.org/10.46806/jkb.v9i2.770>.
- Tilly, C. (2003). Political Identity in Changing Politics. *Social Research*, Volume 70, No. 2 Summer.

Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemenkumham: JDIH.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Pemilihan Umum. 2017. Jakarta: KPU.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian

Suparlan, P. (1980). *The Javanese in Suriname*. (Disertasi). University of Illinois Urbana, Chicago, USA.

Makalah Seminar, Lokakarya, Penataran

Maimun. (2015). Aktualisasi Pendidikan Keteladanan dalam Meredam Ideologi Radikal di Indonesia Memperkokoh Jatidiri PKn. *Prosiding Seminar Nasional: Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn*, 255-263. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.